

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir semua dana dari APBD yang digunakan untuk membiayai pembangunan adalah hasil dari pajak/ retribusi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pos APBD di bidang penerimaan yang dikategorikan dalam tiga kategori berikut ini.

Kategori Pertama adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Apabila kita meneliti dana yang dipergunakan untuk modal perusahaan daerah dan pengadaan kekayaan yang dipisahkan, kita akan mendapati fakta bahwa dana yang dipergunakan berasal dari pajak maupun retribusi. Demikian pula lain-lain PAD yang berasal dari penjualan aset, sewa aset dan jasa giro rekening Pemda di bank, sumber pengadaan aset dan dana yang terakumulasi di bank berasal dari pajak dan retribusi juga.

Kategori Kedua adalah dana perimbangan merupakan sumber dana terbesar dalam APBD kita. Dana perimbangan ini terdiri dari: Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Penjabaran dan sumber dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang berisi komponen-komponen sebagai berikut: Bagi Hasil PBB, BPHTB dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Dana Alokasi Umum yang berasal dari bagian Pajak Pusat seperti Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM dan Hasil Bumi Indonesia seperti Hasil Hutan dan Hasil Minyak bumi. Dana ini terutama digunakan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
3. Dana Alokasi Khusus yang berasal dari bagian Pajak Pusat dan Hasil Bumi Indonesia yang digunakan untuk kebutuhan khusus seperti perbaikan daerah tertinggal atau akibat bencana.
4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi terdiri dari komponen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Penggunaan BBM dan Pajak Air Bawah tanah.

Dari keempat sumber dana dalam Dana Perimbangan kita dapatkan fakta bahwa sebagian terbesarnya berasal dari pajak. Kategori Ketiga adalah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang dalam APBD kita berupa Dana Bantuan penyeimbang DAU. Selain itu Belanja Pemerintah Daerah juga didanai oleh Pembiayaan yang bersal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, Piutang dan Pinjaman Daerah. Sudah merupakan kewajiban otoritas belanja pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan belanja dengan penuh tanggung jawab.

Pemborosan anggaran serta kebocoran dalam pelaksanaannya merupakan berita yang kita terima sehari-hari dari berbagai tempat di Indonesia. Menurut Baswir (2000), masalah kebocoran adalah masalah yang sangat serius di dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Selama ini masalah ini lebih banyak disoroti aspek moralnya. Tidak banyak pihak yang menyadari bahwa masalah kebocoran sebagai sebuah persoalan kegagalan administrasi, sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan metode pengelolaan, metode pembukuan dan metode pengawasan keuangan negara itu sendiri.

Landasan kebijaksanaan pengawasan dalam organisasi pemerintah adalah TAP MPR No II/MPR/1998 tentang GBHN yang telah menggariskan pokok-pokok arah dan kebijakan pembangunan aparatur pemerintah sebagai berikut:

- a) Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara.
- b) Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan semakin ditingkatkan terutama dalam rangka menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan wibawa aparatur pemerintah.

Disamping itu menurut pasal 1, lampiran Instruksi Presiden Nomor 15/1983, dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Terlaksananya tugas umum pemerintah secara tertib didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan pada sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Terlaksananya pembangunan, sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c) Tercegahnya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien).

Pengawasan terhadap penerimaan Negara dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Pengawasan Terhadap Penerimaan Pajak dan Bea Cukai, dan Pengawasan Terhadap Penerimaan bukan Pajak. Bila pengawasan terhadap penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak, dan pengawasan terhadap penerimaan bea cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai, maka pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN.

Inspektorat merupakan badan yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pengawasan

Preventif penerimaan pajak daerah kota Surakarta yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta serta seberapa efektif dan efisien pengawasan yang mereka lakukan diukur dengan keberhasilan penerimaan daerah. Mengukur kinerja pajak dapat ditinjau dari sisi efektivitas maupun efisiensinya. Secara khusus peneliti memilih Inspektorat yang berada di kota Solo yang merupakan tempat domisili peneliti.

Dari uraian di atas, peneliti perlu untuk melakukan penelitian mengenai ke-efektifitasan pelaksanaan pengawasan penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya pemerintah daerah kota Surakarta dari sektor pajak. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

**“Penilaian Pelaksanaan Pengawasan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Studi Pada Inspektorat Wilayah Kota Surakarta)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Preventif yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta ?
2. Seberapa efektif dan efisien pengawasan yang mereka lakukan tersebut diukur dari keberhasilan penerimaan daerah ?

### **C. BATASAN MASALAH**

Maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak daerah Kota Surakarta, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2008 sampai tahun 2010.
3. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengawasan preventif yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai bagaimana pengawasan preventif yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta.
2. Untuk menilai seberapa efektif dan efisien pengawasan yang mereka lakukan tersebut diukur dari keberhasilan penerimaan daerah.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a) Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai bidang pengawasan keuangan daerah yang berasal dari pajak.

b) Bagi Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Surakarta

Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

c) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I      Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang pemahaman mengenai bidang perpajakan. Penjabaran definisi pajak, unsur-unsur pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, jenis-jenis pajak daerah, pengawasan keuangan negara dan susunan organisasi Inspektorat Kota Surakarta.

### Bab III Metode Penelitian.

Berisi tentang jenis penelitian, pengukuran data, teknik pengumpulan data, definisi operasi, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### Bab IV Pembahasan

Berisi tentang profil singkat kota Surakarta, gambaran umum instansi secara singkat perihal wilayah kerja, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Inspektorat Kota Surakarta, serta analisis data yang telah dikumpulkan.

### Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan.